

**PENGARUH PROGRAM REGISTRASI PEDAGANG KAKI
LIMA (PKL) TERHADAP MOTIVASI DAN TINGKAT
KEPUASAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTA SAWAHLUNTO**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

**TANZILUL HIKMAH
2005/64734**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Program Registrasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Motivasi dan Tingkat Kepuasan Pedagang Kaki Lima Di Kota Sawahlunto

Nama : Tanzilul Hikmah

Nim : 2005 / 64734

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

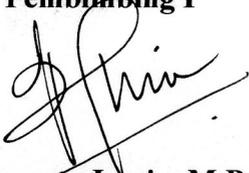
Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 7 Februari 2011

Disetujui oleh :

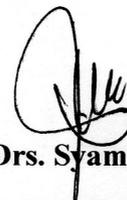
Pembimbing I



Drs. Dasman Lanin, M.Pd. Ph.D

NIP. 19570416 198602 1 001

Pembimbing II



Drs. Syamsir, M.Si

NIP. 19630401 198903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Senin 7 Februari 2011 pukul 14.00 s/d 16.00 WIB

Pengaruh Program Registrasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Motivasi dan Tingkat Kepuasan Pedagang Kaki Lima Di Kota Sawahlunto

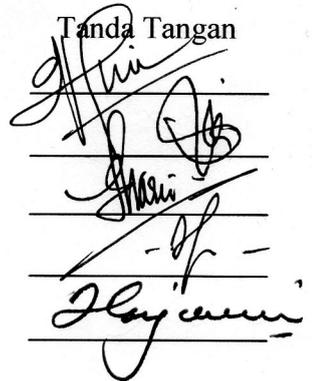
Nama : Tanzilul Hikmah
Nim : 2005 / 64734
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 7 Februari 2011

Tim Penguji :

Nama
Ketua : Drs. Dasman Lanin, M.Pd. Ph.D
Sekretaris : Drs. Syamsir, M.Si
Anggota : Dra. Hj. Maria Montessori, M.Ed, M.Si
Anggota : Dra. Hj. Henni Candra Gustina
Anggota : Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si

Tanda Tangan



Mengesahkan :



ABSTRAK

Tanzilul Hikmah, 2005/64734 : Pengaruh Program Registrasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Motivasi dan Tingkat Kepuasan Pedagang Kaki Lima Di Kota Sawahlunto

Program registrasi pedagang kaki lima yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumatera Barat yang bertujuan untuk menjadi salah satu alternatif atau solusi dalam memberdayakan PKL ternyata belum mampu untuk memotivasi pedagang dalam menjalankan usahanya. Rendahnya respon pedagang terhadap program registrasi ini terindikasi karena pelaksanaan dilapangan yang kurang efektif, dimana sulitnya PKL untuk bisa mendapatkan pinjaman dari koperasi yang mewadahi, ketidakpuasan pedagang karena kecilnya jumlah pinjaman dirasa belum dapat memberikan kontribusi atau manfaat untuk mengembangkan usaha yang mereka jalani, serta mekanisme pemberian dan pengembalian pinjaman yang dirasa masih memberatkan pedagang, sehingga akhirnya banyak pedagang yang masih memilih meminjam kepada para rentenir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh program registrasi pedagang kaki lima terhadap tingkat motivasi dan tingkat kepuasan pedagang kaki lima di Kota Sawahlunto.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan teknik pengambilan sampel secara total sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang diisi oleh pedagang kaki lima yang sudah teregistrasi pada tahun 2008. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan korelasi product moment pearson dengan bantuan program SPSS (*statistic product service solution*) versi 15.00 for window.

Penelitian ini telah membuktikan bahwa pengaruh program registrasi pedagang kaki lima terhadap motivasi adalah signifikan pada taraf 11%, artinya bahwa pengaruh program registrasi pedagang kaki lima terhadap motivasi pedagang kaki lima Kota Sawahlunto dapat dipercaya pada taraf 89%, dan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pedagang kaki lima pada taraf signifikan 7%, artinya bahwa pengaruh program registrasi pedagang kaki lima terhadap tingkat kepuasan pedagang kaki lima Kota Sawahlunto dapat dipercaya pada taraf 93%.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Penyayang serta rasa syukur yang sedalam-dalamnya dipersembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas Rahman dan Rahim-Nya akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul : Pengaruh Program Registrasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Motivasi dan Tingkat Kepuasan Pedagang Kaki Lima Di Kota Sawahlunto. Shalawat dan salam buat uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Orang tua yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi kepada penulis secara moral maupun material serta doa untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. H. Azwar Ananda, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang Padang yang telah memberikan persetujuan sehingga penelitian ini bisa diselesaikan.
3. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang Padang yang telah memberikan persetujuan sehingga penelitian ini bisa diselesaikan.
4. Bapak Drs. Dasman Lanin, M.Pd. Ph.D selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Syamsir, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Dra. Hj. Maria Montessori, M,Ed, M.Si selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Hj. Henni Candra Gustina selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Karjuni Dt. Ma'ani, M.Si selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Bapak Ir. Afriadi Laudin, M.Si selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat
10. Ibu Yusliani, S.Pd selaku ketua Koperasi Pedagang Kaki Lima (Kopkal) Sawahlunto
11. Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Kota Sawahlunto.
12. Ibu Indra Husni Narwis, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD N 29 Dadok Tunggul Hitam serta bapak/ibu majelis guru.
13. Teman-teman seperjuangan terutama bagi rekan-rekan IAN 2005.

Semoga semua bimbingan, bantuan, masukan, kritikan, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dari penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua.

Padang, Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis	11
1. Konsep Pedagang Kaki Lima.....	11
2. Konsep Motivasi	25
3. Konsep Kepuasan.....	32
B. Kerangka Konseptual	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37

B. Variabel dan Definisi Operasional Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian	39
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	39
E. Jenis, Sumber, Alat Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	51
1. Gambaran Umum Kota Sawahlunto	51
2. Deskripsi Umum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sumatera Barat.....	55
3. Deskripsi Data Keadaan Demografis.....	64
4. Deskripsi Proses Registrasi Pedagang Kaki Lima.....	67
5. Deskripsi Keadaan Motivasi Pedagang Kaki Lima	74
6. Deskripsi Keadaan Kepuasan PKL dengan Program Registrasi.....	85
7. Pengaruh Program Registrasi Terhadap Motivasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sawahlunto.....	93
8. Pengaruh Program Registrasi Terhadap Kepuasan Pedagang Kaki Lima di Kota Sawahlunto.....	94
B. Pembahasan Hasil Penelitian	95
1. Proses Registrasi Pedagang Kaki Lima di Kota Sawahlunto.....	96
2. Pengaruh Program Registrasi (X) Terhadap Motivasi Pedagang Kaki Lima Kota Sawahlunto (Y1).....	97
3. Pengaruh Program Registrasi (X) Terhadap Kepuasan	

Pedagang Kaki Lima Kota Sawahlunto (Y2).....	99
C. Keterbatasan Penelitian	100
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tingkat Reliabilitas.....	43
Tabel 3.2	Hasil uji coba validitas proses registrasi PKL	44
Tabel 3.3	Hasil uji coba reliabilitas proses registrasi PKL.....	44
Tabel 3.4	Hasil uji coba validitas motivasi PKL	45
Tabel 3.5	Hasil uji coba reliabilitas motivasi PKL	46
Tabel 3.6	Hasil uji coba validitas kepuasan PKL dengan program registrasi	47
Tabel 3.7	Hasil uji coba reliabilitas kepuasan PKL dengan program registrasi.....	47
Tabel 4.1	Jumlah penduduk Kota Sawahlunto menurut kecamatan	53
Tabel 4.2	Distribusi frekuensi penyebaran responden berdasarkan umur.....	64
Tabel 4.3	Distribusi frekuensi penyebaran responden berdasarkan jenis kelamin	65
Tabel 4.4	Distribusi frekuensi penyebaran responden berdasarkan pendidikan.....	66
Tabel 4.5	Distribusi frekuensi penyebaran responden berdasarkan status perkawinan.....	66
Tabel 4.6	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk sosialisasi kepada pedagang yang akan diregistrasi.....	68
Tabel 4.7	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk pemahaman kepada pedagang tentang syarat-syarat registrasi	68
Tabel 4.8	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk PKL yang	

	diregistrasi terintegrasi dengan koperasi	70
Tabel 4.9	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk PKL teregistrasi mendapatkan <i>Id Card</i>	70
Tabel 4.10	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk PKL mendapatkan pinjaman dari koperasi.....	71
Tabel 4.11	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk monitoring oleh petugas terhadap program registrasi	72
Tabel 4.12	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk evaluasi terhadap program	73
Tabel 4.13	Distribusi tingkat pencapaian responden untuk proses registrasi.....	74
Tabel 4.14	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk kebutuhan dasar.....	75
Tabel 4.15	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk program registrasi sangat membantu usaha pedagang lebih maju	76
Tabel 4.16	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk kebutuhan pedagang akan perhatian pemerintah kota.....	77
Tabel 4.17	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk pengurus koperasi cepat tanggap membantu keluhan pedagang.....	78
Tabel 4.18	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk kebutuhan tempat berjualan bagi pedagang.....	79
Tabel 4.19	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk kebutuhan rasa kebanggaan dan status yang tinggi dalam masyarakat.....	80
Tabel 4.20	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk pengakuan dan penghargaan diri dalam masyarakat.....	81

Tabel 4.21	Distribusi frekuensi jawaban responden kebutuhan untuk bekerja dan membina hubungan baik dengan banyak orang...	82
Tabel 4.22	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk kebutuhan merubah kondisi sosial lebih baik	83
Tabel 4.23	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk kebutuhan pedagang untuk menyalurkan bakat usaha dengan bantuan perkuatan modal dari Diskoperindag.....	84
Tabel 4.24	Distribusi tingkat pencapaian responden untuk motivasi.....	85
Tabel 4.25	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk harapan peningkatan besarnya jumlah pinjaman.....	86
Tabel 4.26	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk harapan pelayanan sepenuh hati dari pengurus koperasi	87
Tabel 4.27	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk harapan terhadap mekanisme pemberian dan pengembalian pinjaman...	88
Tabel 4.28	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk harapan terhadap pelayanan sosial.....	88
Tabel 4.29	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk jumlah dana pinjaman perkuatan modal sudah mencukupi.....	89
Tabel 4.30	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk pelayanan yang dirasakan pedagang sudah baik dan sepenuh hati.....	90
Tabel 4.31	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk mekanisme pemberian dan pengembalian pinjaman koperasi sudah baik...	91
Tabel 4.32	Distribusi frekuensi jawaban responden untuk pelayanan sosial terhadap pedagang sudah baik dan memuaskan.....	92

Tabel 4.33	Keadaan kepuasan pedagang dengan program registrasi.....	93
Tabel 4.34	Pengaruh program registrasi terhadap motivasi pedagang kaki lima Kota Sawahlunto.....	94
Tabel 4.35	Pengaruh program registrasi terhadap tingkat kepuasan pedagang kaki lima Kota Sawahlunto.....	95

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Kerangka Konseptual	36
-----------	---------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Organisasi
- Lampiran 2 Angket Penelitian
- Lampiran 3 Tabulasi Uji Coba Instrumen
- Lampiran 4 Data Uji Validitas Realibilitas
- Lampiran 5 Tabulasi Data
- Lampiran 6 Hasil Korelasi
- Lampiran 7 Frekuensi Item Pertanyaan
- Lampiran 9 Surat Izin Penelitian Dari Fakultas
- Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian (Pengambilan Data dan Bahan-Bahan Yang Diperlukan Sesuai Dengan Judul Penelitian) dari Instansi Terkait
- Lampiran 11 Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Sawahlunto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus dapat memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal ditujukan mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, berkeadilan, sejahtera, maju, mandiri, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Dengan demikian, membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya merupakan agenda pembangunan yang penting dan strategis.

Era globalisasi dan modernisasi yang terjadi di Indonesia dalam dua dasawarsa ini telah banyak menimbulkan masalah dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sulitnya mencari pekerjaan dan banyaknya karyawan yang di PHK merupakan kenyataan yang banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Menurut Mulyanto (2007: 73), krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat di Jawa Tengah menurun dan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat. Meskipun kasus yang diungkapkan Mulyanto adalah mengenai kondisi di daerah Jawa Tengah, namun boleh jadi kasus dan kondisi yang sama juga terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi

Sumatera Barat. Pemecahan masalah paling sederhana yang muncul dari pemikiran sekelompok masyarakat kecil untuk bertahan hidup adalah dengan cara menjajakan berbagai jenis barang dagangan, makanan, atau minuman dalam skala kecil. Kelompok masyarakat inilah yang sekarang lebih sering dikenal dan populer dengan sebutan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pekerjaan sebagai PKL merupakan bagian yang tidak dapat lepas dari aktifitas sektor informal. Bahkan di daerah-daerah perkotaan PKL memegang peranan yang cukup penting dalam pengembangan sektor ekonomi dan perdagangan daerah. Mereka menggunakan tenaga kerja secara maksimum tanpa memerlukan modal yang besar. Dinamika yang berkembang dalam sektor informal ini cukup banyak menghasilkan surplus yang kemudian diinvestasikan kembali dalam sektor ini. Pertumbuhan dan perkembangan sektor informal PKL ini terjadi berdasarkan kekuatan sendiri. Perkembangan PKL dari waktu ke waktu sangat pesat jumlahnya, karena PKL ini dapat lebih mudah untuk di jumpai oleh konsumennya dari pada pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap. Sehingga konsumen dimudahkan untuk memenuhi kebutuhan untuk barang-barang eceran. PKL selalu memanfaatkan tempat-tempat yang senantiasa dipandang profit misalkan pusat kota, alun-alun, tempat keramaian hingga tempat-tempat yang dinilai berpotensi untuk menjadi objek wisata.

PKL meski diakui embrionya pedagang besar tak jarang diuber-uber dan digusur oleh petugas dengan berselimut penertiban tanpa mencarikan solusinya. Tidak jarang, aksi pengusuran diwarnai dengan isak tangis dan deraian air mata, pekikan histeris rakyat yang bernama PKL. Sebagian mereka merasa tidak lagi

berada di negeri sendiri, sangat terasa sulitnya mencari nafkah di tanah kelahiran sendiri walaupun mereka tidak bercita-cita untuk tetap menjadi PKL seumur hidup. Nasib tragis para PKL ini sering disaksikan melalui pemberitaan media massa baik televisi maupun media cetak (Forum Koperasi, Edisi Juli 2009 ; 5).

Besarnya potensi yang terdapat di balik pertumbuhan sektor informal selama ini, termasuk PKL belum terprediksi dan terkelola dengan baik. Sementara permasalahan sektor informal itu sendiri berkembang seiring dengan kompleksitas migrasi dan urbanisasi yang kian meningkat dari hari ke hari. Oleh karena itu, dalam merespons kondisi ini, Menteri Negara Koperasi dan Gubernur Sumatera Barat menghimbau seluruh pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera mengimplementasikan keberpihakan terhadap PKL yang diatur Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima. Disamping itu, Deputy bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan bahwa selama ini baru beberapa daerah saja yang sudah dengan baik mengimplementasikan kebijakan PKL itu. Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota mencoba melakukan pemberdayaan dan memberikan kepastian usaha kepada PKL.

Selama ini, setiap pemerintah Kabupaten/Kota telah mengembangkan infrastruktur perekonomian. Dalam pengembangan infrastruktur perekonomian tersebut, seringkali masalah PKL terabaikan dan tidak diperhatikan. Padahal pengaturan pedagang termasuk PKL, sebaiknya diatur dalam lingkup pemerintah daerah. Seperti praktek di beberapa kota besar di negara maju, saat ini jumlah

PKL cukup besar dan memiliki potensi yang dapat menyediakan lapangan kerja dalam masyarakat. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam mengatur dan menangani PKL hendaklah diposisikan sebagai komponen yang mengayomi dan melindungi.

Namun dalam kenyataannya Pedagang Kaki Lima (PKL) sering dipandang sebagai pembuat masalah (*trouble maker*) dan bukan sebagai bagian dari solusi untuk membantu Pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan mandiri ataupun sebagai *safety belt* bagi tenaga kerja yang memasuki pasar kerja. Mereka masih sering dituding sebagai kambing hitam dan penyebab terjadinya kesemrawutan lalu lintas atau penyebab pencemaran (kekotoran) lingkungan. Selain itu, tidak jarang pula aksi penggusuran yang dilakukan oleh para petugas tersebut diwarnai oleh konflik antara petugas dan para PKL. Selain itu, bila dicermati lebih jauh, sebenarnya usaha yang dijalankan sebagian PKL tersebut hanya merupakan '*pelarian*' sesaat. karena usaha yang dijalankan sebelumnya telah gulung tikar, dan sebagian lagi karena korban PHK (pemutusan hubungan kerja). Mereka berjuang hanya untuk bisa bertahan hidup menjelang dapat usaha yang lebih baik. Sebenarnya kalau direnungkan secara lebih mendalam, peranan PKL sungguh sangat penting dan amat membantu masyarakat konsumen karena mereka dapat berbelanja murah dan mudah didapatkan disamping mengurangi angka pengangguran yang semakin hari semakin meningkat di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan dan kondisi di atas, Dinas Koperindag Provinsi Sumatera Barat telah mencoba memberikan alternatif untuk pemberdayaan masyarakat PKL dalam rangka meningkatkan motivasi serta mengangkat martabat

PKL dengan meluncurkan Program Registrasi PKL di provinsi Sumatera Barat yang dimulai sejak tahun 2008 yang dilakukan pada lima kota seperti Kota Sawahlunto, Kota Payahkumbuh, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Batusangkar, dan akan dilanjutkan pada tahun 2010 mendatang untuk Kabupaten dan Kota lainnya di Sumatera Barat. Tujuan program Registrasi PKL tersebut antara lain: 1) Memberdayakan PKL melalui Koperasi sehingga PKL yang dibina memiliki kepastian berusaha; 2) Meningkatnya peran Koperasi dalam pengembangan serta pengelolaan sarana usaha PKL; 3) Memberikan contoh/model bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan sarana usaha PKL melalui Koperasi; dan 4) Mengevaluasi tingkat perkembangan usaha (kemajuan usaha dapat diukur). Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program ini adalah: 1) Tertatanya PKL melalui wadah Koperasi; 2) Terwujudnya peningkatan peran Koperasi dalam memberikan pelayanan kepada para anggotanya; 3) Terfasilitasinya anggota Koperasi dalam Sarana Usaha yang berkualitas; 4) Tergabungnya PKL melalui usaha formal Koperasi; dan 5) Tersedianya *database* PKL telah diregistrasi se Sumatera Barat.

Seiring dengan program Registrasi PKL ini pihak Koperindag Provinsi Sumatera Barat telah memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman lunak kepada para PKL yang telah diregistrasi sebanyak Rp. 300.000,- per PKL melalui koperasi masing-masing daerah (Kota/Kabupaten) untuk program registrasi tahun 2008. Program registrasi dan pemberian bantuan untuk tahun 2008 untuk para PKL Pasar Sawahlunto diberikan melalui Koperasi Pedagang Kaki Lima (KOPKAL) yang dipimpin oleh Ibu Yusliani. Bantuan (pinjaman) ini diharapkan

akan dapat memotivasi dan lebih memberdayakan para PKL dalam meningkatkan atau mengembangkan usahanya di masa yang akan datang.

Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan pada beberapa pedagang kaki lima pasar Sawahlunto (tanggal 10 Mei 2010), bahwa adanya permasalahan yang masih belum terselesaikan dalam rangka memotivasi dan memberdayakan Pedagang Kaki Lima melalui program registrasi PKL yang dilaksanakan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat. Dimana adanya ketidakadilan dalam proses registrasi yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima. Masih adanya anggota PKL yang sudah diregistrasi dan memiliki *ID CARD* namun belum bisa untuk melakukan peminjaman. Juga terdapat ketidakpuasan pedagang terhadap jumlah pinjaman yang diberikan untuk dijadikan modal berusaha. Kecilnya jumlah pinjaman yang diberikan, bagi sebagian pedagang dirasakan masih belum dapat memberikan kontribusi atau manfaat dalam menunjang dan mengembangkan usaha yang mereka jalani. Serta mekanisme pengembalian atau pengambilan uang pinjaman oleh koperasi kepada pedagang yang dirasakan para pedagang sangat memberatkan.

Sulitnya proses yang harus dijalani oleh pedagang untuk bisa mendapatkan pinjaman, sehingga banyak para pedagang yang masih memilih para rentenir untuk mendapatkan pinjaman dana untuk dijadikan modal. Hal ini mengindikasikan bahwa menurunnya tingkat motivasi pedagang dalam menjalani pekerjaan mereka sebagai PKL. Ditambah lagi belum adanya payung hukum yang mengatur secara jelas dan nyata tentang keberadaan pedagang kaki lima ini, sehingga mereka masih merasa belum terakomodasi dan merasa belum

diperhatikan oleh pemerintah daerah. Sehingga mereka dalam menjalani usaha belum merasa tenang dan nyaman karena kepastian hukum belum mereka dapatkan secara jelas dan pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat motivasi mereka dalam menjalani usahanya. Kemudian kurangnya monitoring yang dilakukan ke bawah sehingga program ini tidak berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan permasalahan yang peneliti uraikan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk melihat sejauh mana **”Pengaruh Program Registrasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Motivasi dan Tingkat Kepuasan Pedagang Kaki Lima Di Kota Sawahlunto”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Pedagang yang sudah diregistrasi dan memiliki kartu anggota tidak bisa atau sulit untuk mendapatkan pinjaman.
2. Masih banyak pedagang yang meminjam dana kepada rentenir.
3. Masih rendahnya gairah kerja atau motivasi kerja pedagang kaki lima Kota Sawahlunto.
4. Ketidakpuasan pedagang terhadap jumlah pinjaman yang diberikan.
5. Payung hukum yang mengatur pedagang kaki lima (PKL) belum mampu mewujudkan kondisi yang lebih baik.

C. Pembatasan Masalah

Dari beberapa faktor yang menjadi penyebab masalah diatas, maka masalah penelitian ini dibatasi pada Pengaruh Program Registrasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Motivasi dan Tingkat Kepuasan Pedagang Kaki Lima Di Kota Sawahlunto, masih rendahnya motivasi pedagang kaki lima setelah diberikan bantuan perkuatan modal oleh Koperindag Provinsi Sumatera Barat. Kurang puasnya pedagang dikarenakan kecilnya jumlah pinjaman yang diberikan serta sulitnya untuk bisa mendapatkan pinjaman yang pada akhirnya pedagang masih banyak yang berurusan dengan para rentenir. Pedagang Kaki Lima yang akan diteliti dalam penelitian ini dibatasi pada PKL yang telah teregistrasi pada program registrasi PKL oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat tahun 2008.

D. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana proses registrasi terhadap Pedagang Kaki Lima Kota Sawahlunto ?
2. Bagaimana gambaran motivasi Pedagang Kaki Lima Kota Sawahlunto dengan program registrasi ?
3. Bagaimana gambaran tingkat kepuasan Pedagang Kaki Lima dengan program registrasi ?

4. Apakah terdapat pengaruh program registrasi terhadap tingkat motivasi Pedagang Kaki Lima Kota Sawahlunto ?
5. Apakah terdapat pengaruh program registrasi terhadap tingkat kepuasan Pedagang Kaki Lima Kota Sawahlunto ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini antara lain bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses registrasi Pedagang Kaki Lima Kota Sawahlunto.
2. Untuk mengetahui tingkat motivasi Pedagang Kaki Lima Kota Sawahlunto dengan pogram registrasi.
3. Untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan Pedagang Kaki Lima Kota Sawahlunto dengan program registrasi.
4. Untuk mengetahui pengaruh program registrasi Pedagang Kaki Lima terhadap motivasi Pedagang Kaki Lima Kota Sawahlunto.
5. Untuk mengetahui pengaruh program registrasi Pedagang Kaki Lima terhadap tingkat kepuasan Pedagang Kaki Lima Kota Sawahlunto.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis.

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi negara yang berkaitan dengan kebijakan publik, terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat praktis.

Bermanfaat sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Daerah dan Departemen Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat dalam pengelolaan pedagang kaki lima sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keteraturan dalam masyarakat.

3. Bagi peneliti sendiri sebagai acuan sekaligus penerapan ilmu yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Program Registrasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Motivasi dan Tingkat Kepuasan Pedagang Kaki Lima Di Kota Sawahlunto”, yang menjadi kajian teoritisnya adalah, (1) Konsep pedagang kaki lima ; a) Pengertian pedagang kaki lima, b) Eksistensi pedagang kaki lima (PKL) dalam pembangunan ekonomi global, c) Standar operasional prosedur / persyaratan registrasi PKL, d) Program registrasi PKL dan pemberian bantuan / pinjaman terhadap PKL, e) Sejarah Koperasi Pedagang Kaki Lima (Kopkal) Sawahlunto, (2) Motivasi ; a) Teori motivasi, b) Faktor yang mempengaruhi motivasi, c) Faktor penghambat motivasi. (3) Konsep kepuasan.

1. Konsep Pedagang Kaki Lima

a. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Dalam kamus bahasa Indonesia memang belum dikenal tentang definisi Pedagang Kaki Lima, namun Pedagang Kaki Lima dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha informal yang dilakukan oleh seseorang, badan atau lembaga dengan menjual barang atau produk dagangan yang tidak memiliki tempat usaha permanen yang sewaktu-waktu dapat berpindah-pindah tempat untuk menjajakan barang dagangannya. Dari mana sebenarnya asal muasal kata Pedagang Kaki Lima belum ada yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan secara pasti. Ada yang memperkirakan, kaki lima itu ada hubungannya dengan dua kaki si abang tukang jualan, dua roda gerobaknya dan kaki limanya adalah cagak yang dipasang

si abang kalau lagi mangkal untuk memastikan gerobak tertopang seimbang dan gerobaknya tidak lari menggelinding.

Menurut Perda No. 11 tahun 2005 menjelaskan bahwa, Pedagang Kaki Lima adalah orang atau perorangan yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak, yang menggunakan sebagian atau seluruhnya tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Jadi Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang yang menawarkan atau menjual barang atau jasa di tempat umum yang hanya untuk sementara waktu. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menggelar dagangannya di muka (emperan) di pinggir jalan (Depdikbud 1997).

Dari Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia menyatakan Pedagang Kaki Lima atau yang disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah ini sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga kaki gerobak. Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintah waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan kaki adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk mengembangkan usaha tersebut. Satu-

satunya sektor yang masih bertahan sampai saat ini adalah sektor informal yang di dalamnya terdapat salah satu kegiatan yang saat ini berkembang pesat yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL).

Sektor informal merupakan unit usaha kecil dengan modal yang diperlukan juga kecil bahkan sistem pengolahannya sangat sederhana. Meskipun dengan modal kecil, orang-orang yang bekerja disektor informal mampu mempertahankan hidupnya. PKL merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Istilah sektor informal ini mulai diperkenalkan Keith Hart dalam penelitiannya tentang unit-unit usaha kecil pada tahun 1971. Kemudian istilah ini dipopulerkan oleh International Labor Organization (ILO) pada tahun 1973 melalui laporannya tentang aspek pembangunan dan kesempatan kerja di daerah perkotaan di Negara-negara yang sedang berkembang (Suwarno dan Hidayat, 1978). Dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Aktivitas pada sektor informal tidak terorganisir dengan baik
2. Sektor informal tidak mempunyai hubungan langsung dengan pemerintah
3. Pada umumnya setiap unit izin dari pemerintah
4. Pola kegiatan seperti tempat dan jam kerja biasanya tidak teratur
5. Unit usaha ini mudah berpindah dan berubah
6. Usaha ini terbilang kecil dikarenakan modal yang mendukung juga kecil
7. Teknologi yang digunakan juga sangat sederhana

8. Biasanya untuk mengelola usaha ini tidak diperlukan tingkat pendidikan tertentu, tetapi keahliannya didapat dari sistem pendidikan non formal dan pengalaman di lapangan
9. Pengoperasian unit usaha ini biasanya berasal dari satu lingkungan keluarga
10. Sumber dana untuk modal tetap kebanyakan berasal dari sumber keuangan tidak resmi
11. Konsumen utama dari unit usaha ini biasanya berasal dari golongan menengah.

Berbicara tentang perdagangan, tidak terlepas dari komunitas pedagang sebagai pelakunya. Salah satu yang lebih dikenal dengan sebutan PKL, yaitu suatu usaha informal yang dilakukan seseorang atau lembaga dengan menjual barang atau produk dagangan yang tidak memiliki tempat usaha permanen dan sewaktu-waktu dapat berpindah-pindah tempat untuk menjajakan barang dagangannya (kamus bahasa Indonesia).

PKL adalah salah satu profesi atau pekerjaan informal yang terdapat hampir di setiap kota dan di setiap negara manapun. Menurut Bromley (1991 : 230 dalam Mulyanto, 2007 : 74), pedagang kaki lima merupakan kelompok tenaga kerja yang cukup banyak jumlahnya di sektor informal. Perkembangan pedagang kaki lima dari waktu sangat pesat peningkatan jumlahnya. PKL bukan hal yang baru karena pedagang kaki lima sudah lahir dan tumbuh bersama-sama pertumbuhan kota, terutama pada negara-negara yang sedang berkembang. Namun demikian berdasarkan hasil pengamatan peneliti, di kota pedagang kaki

lima sudah sejak lama menjadi persoalan bagi pemerintah kota yang penyelesaiannya sampai sekarang belum tuntas termasuk di Kota Sawahlunto. PKL yang umumnya berjualan di ruas-ruas kota, di lokasi pasar dan beberapa tempat yang dianggap strategis oleh PKL membuat kota terlihat semakin semrawut dan tidak indah lagi serta membuat jalan menjadi macet.

Bahri (2001) dalam Arman (2004 : 12) membagi secara garis besar pedagang kaki lima menurut kelompok usaha dapat dibagi menjadi tujuh kelompok, yaitu : a) makanan dan minuman, b) pakaian, mainan anak-anak, kelontong, c) jasa perorangan (kelompok pengrajin, tukang, dll), d) barang cetakan (Koran, majalah, buku), e) onderdil mobil (ban bekas, kaca spion, aksesoris), f) buah-buahan, g) rokok dan lainnya. Sedangkan menurut fasilitas dagangannya pedagang kaki lima dapat dibagi atas : (a) pikulan atau keranjang, (b) kaki lima atau alas, (c) meja atau kotak, (d) kereta atau roda dorong, (e) kios.

Selanjutnya Hidayat (1978) dalam Sofia (1992 : 2) menyatakan bahwa ciri-ciri pedagang kaki lima adalah : (a) kegiatan usaha tidak terorganisasikan dengan secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan kelembagaan yang tersedia disektor formal, (b) pada umumnya usaha tidak mempunyai izin usaha, (c) pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai kesektor ini, (d) modal kecil, (e) teknologi yang digunakan sangat sederhana.

b. Eksistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Pembangunan Ekonomi Global

Persaingan bisnis di era globalisasi saat ini semakin terasa dan mengkhawatirkan, terutama di kalangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Artinya, pertarungan yang tak seimbang seringkali terjadi antara kalangan UMKM berhadapan dengan pemodal besar. Salah satu indikatornya adalah hadirnya sejumlah *hypermarket* atau *supermarket* di tengah-tengah pasar-pasar tradisional yang dihuni oleh para pemodal kecil dan menengah. Kehadiran para pemodal besar dengan *supermarketnya* seakan tidak dapat dibendung. Sementara selera pasar sebagian masyarakat Indonesia sudah mulai terjebak dan cenderung terpengaruh oleh gaya, pola, gengsi belanja ala *swalayan* yang ditawarkan oleh *supermarket*. Kondisi ini pada suatu saat jelas akan membuat produk usaha rakyat menjadi semakin terpinggirkan dan kesempatan berusaha para pedagang kecil dan menengah terutama PKL akan semakin terbatas.

Sebagai salah satu negara yang berada dalam lingkup era globalisasi, Indonesia sulit untuk mengelakkan diri dari pengaruh dan arus globalisasi itu. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana menyikapi serangan globalisasi itu dengan arif dan bijak. Salah satu kebijakan yang penting untuk diterapkan adalah membangkitkan kembali semangat kebersamaan yang disertai dengan sikap mencintai produk lokal dan dilandasi dengan semangat nasionalisme yang tinggi, serta memberdayakan para pengusaha kecil dan menengah yang secara nyata memiliki potensi *entrepreneurship*. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengungkapkan pada saat menghadiri peringatan puncak Hari

Koperasi ke 62 di Stadion Madya Semapaja, Samarinda, Kalimantan Timur bahwa peran koperasi, usaha kecil dan usaha menengah ke depan semakin penting. Menurut beliau pula, "Kalau perekonomian dunia dan perekonomian nasional tidak memberikan ruang yang luas bagi koperasi dan usaha kecil menengah, maka bisa terjadi dominasi ekonomi oleh tangan-tangan yang tidak adil". (Dinas Koperasi dan PKM Sumatera Barat, 2009).

Dalam era globalisasi bisa saja perusahaan raksasa dunia akan *mendominasi* semua kegiatan bisnis, termasuk usaha kecil dan menengah. Meskipun keberadaan mereka penting namun bila koperasi dan usaha kecil menengah tidak diberikan ruang gerak dan dibina secara serius maka upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran akan tetap sulit. Solusinya antara lain adalah bahwa ke depan koperasi dan usaha kecil dan menengah mesti dikembangkan di seluruh tanah air agar lebih banyak masyarakat Indonesia yang bisa berusaha.

Pernyataan Presiden SBY tersebut dipertegas lagi oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali yang menyatakan bahwa "Koperasi adalah pengejawantahan institusional dari gerakan anti kapitalisme, yang merupakan 'anak kandung' dari globalisasi". Oleh karena itu membesarkan koperasi dan usaha kecil dan menengah berarti kita telah ikut membendung efek negatif yang akan ditimbulkan oleh globalisasi. Sebaliknya, membiarkan globalisasi tanpa mengantisipasinya sama halnya kita memposisikan rakyat untuk bertanding secara tidak setara dan tidak melindunginya. Hal ini pada akhirnya akan mematikan

kesejahteraan jutaan pedagang kaki lima, buruh, nelayan, petani, dan pelaku ekonomi lemah lainnya (Dinas Koperasi dan PKM Sumatera Barat, 2009)

Dengan demikian, untuk merealisasikan seruan Presiden SBY dan penegasan Menakop dan UKM tersebut, maka diperlukan kearifan dari pihak pengambil keputusan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Kearifan dimaksud bukanlah hanya dalam bentuk *statement*, akan tetapi juga harus dituangkan dalam bentuk regulasi yang disertai dengan sosialisasi yang gencar dan implementasi nyata di tengah-tengah masyarakat. Implementasi ini antara lain harus diwujudkan dengan memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi pergerakan UMKM baik dalam menjalankan usaha maupun dalam peningkatan kualitas SDM, terutama para PKL.

PKL merupakan bagian dari tulang punggung pengembangan ekonomi di Indonesia. PKL sangat membantu menghidupkan perekonomian domestik di daerah. Namun seringkali keberadaan PKL dianggap sebagai pembawa atau pembuat masalah seperti mengganggu ketertiban, keamanan, dan kebersihan (K3). Namun walaupun pedagang kaki lima sering dianggap pembuat masalah, akan tetapi di sisi lain usaha ini sebenarnya dapat memberikan keuntungan ekonomis keluarga pedagang bahkan juga karyawannya. Artinya profesi PKL sebenarnya juga ikut menunjang program pembangunan terutama dalam penanggulangan pengangguran, karena profesi ini memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi ”pengusaha” ekonomi lemah ini.

c. Standar Operasional Prosedur atau Persyaratan Registrasi PKL

Dalam proses registrasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat terhadap PKL yang nantinya akan mendapatkan dana bantuan perkuatan modal dalam menjalani usahanya, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan bagi PKL

- 1). berjualan dilokasi yang diizinkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota
- 2). harus berintegrasi menjadi anggota koperasi atau membentuk koperasi baru
- 3). foto copy kartu tanda penduduk
- 4). mengisi formulir bio data dan usaha yang dikelola
- 5). pedagang kaki lima harus diajukan oleh SKPD yang membidangi koperasi dan UKM Kabupaten / Kota yang bekerjasama dengan Dinas Pasar.

2. Persyaratan dan Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Dana Bantuan Perkuatan Modal dari Diskoperindag Bagi PKL

Koperasi penerima dan pengelola wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1). Koperasi primer yang sudah berbadan hukum dan diusulkan oleh Bupati / Walikota c/q yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten / Kota
- 2). Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) kecuali bagi Koperasi yang baru dibentuk yang semuanya beranggotakan Pedagang Kaki Lima.
- 3). Memiliki pengurus yang aktif dan lengkap
- 4). Memiliki kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas
- 5). Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan

Penetapan Koperasi penerima dan pengelola dana bantuan bagi pedagang kaki lima yang diregistrasi : Koperasi penerima dan pengelola dana bantuan bagi pedagang kaki lima ditetapkan dengan keputusan Gubernur Sumatera Barat, yang memuat nama dan alamat Koperasi, nomor dan tanggal badan hukum koperasi, tahun anggaran dan jumlah dana yang dialokasikan dengan tata cara sebagai berikut :

- 1). Koperasi mengajukan permohonan sebagai koperasi penerima dan pengelola bantuan perkuatan modal Pedagang Kaki Lima kepada SKPD Kabupaten / Kota yang membidangi Koperasi dan UKM.
- 2). Koperasi penerima dan pengelola dana bantuan perkuatan modal harus membuat surat pernyataan pemanfaatan dana yang diketahui oleh SKPD Kabupaten / Kota yang membidangi Koperasi dan UKM.

d. Program Registrasi PKL dan Pemberian Bantuan/Pinjaman terhadap

PKL

Permasalahan PKL dapat dipandang sebagai persoalan publik karena menyangkut nilai dan kebutuhan banyak orang, sehingga permasalahan PKL ini meskipun dapat diidentifikasi tapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik yaitu melalui kebijakan publik (Dunn dalam Nugroho, 2003:58). Anderson dalam Tachjan (2006:19) menerangkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Program registrasi Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu produk kebijakan dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Diskoperindag Sumatera Barat. Kebijakan ini dipandang sangat tepat dalam rangka membangkitkan semangat, memotivasi dan memberdayakan para PKL dalam menjalankan usahanya. Sejak tahun 2008 lalu Dinas Koperindag Provinsi Sumatera barat telah melaksanakan Program Registrasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diiringi dengan pemberian bantuan bagi para PKL. Program yang dilancarkan oleh Dinas Koperindag Provinsi Sumbar ini diawali dengan meregistrasi 1.000 PKL di lima kota di Sumatera Barat yaitu Kota Payakumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang, Batusangkar dan juga Kota Sawahlunto.

Tujuan program Registrasi PKL tersebut adalah: 1) Memberdayakan PKL melalui Koperasi sehingga PKL yang dibina memiliki kepastian berusaha; 2) Meningkatnya peran Koperasi dalam pengembangan serta pengelolaan sarana usaha PKL; 3) Memberikan contoh/model bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan sarana usaha PKL melalui Koperasi; dan 4) Mengevaluasi tingkat perkembangan usaha (kemajuan usaha dapat diukur). Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program ini adalah: 1) Tertatanya PKL melalui wadah Koperasi; 2) Terwujudnya peningkatan peran Koperasi dalam memberikan pelayanan kepada para anggotanya; 3) Terfasilitasinya anggota Koperasi dalam Sarana Usaha yang berkualitas; 4) Tergabungnya PKL melalui usaha formal Koperasi; dan 5) Tersedianya data base PKL telah diregistrasi se Sumatera Barat.

Terobosan Dinas Koperindag Sumbar ini, ternyata tak hanya disambut antusias oleh para PKL, tetapi juga dikagumi oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menekop UKM Suryadharma Ali. Ketika *melaunching* registrasi 4.000 PKL di halaman kantor gubernur Sumatera Barat pada tanggal 10 Juli 2008 lalu (Forum Koperasi, Edisi Juli 2009 Halaman 5), Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa PKL jangan dianggap sebagai pembuat masalah. Tetapi malah PKL justru harus dilegalkan, diberikan tempat berusaha yang jelas, aman dan nyaman, serta dipermudah akses permodalan mereka sehingga mereka mempunyai kepastian berusaha.

Program Registrasi PKL dipandang sangat tepat dalam rangka membangkitkan semangat dan motivasi para PKL dalam menjalankan usahanya. Dengan program ini mereka diharapkan mampu berkembang dan berdaya. Apalagi di tengah krisis ekonomi saat ini tidak sedikit pekerja korban PHK di sektor formal yang turun langsung untuk menjadi PKL demi menyambung hidup bagi keluarga mereka. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Koperindag ini sangat penting peranannya untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, melalui program registrasi PKL ini Pemerintah Daerah akan memiliki *database* yang lengkap tentang para PKL sehingga memudahkan Pemerintah Daerah mengarahkan bantuan serta memantau perkembangan mereka. Bahkan tidak hanya Pemerintah Daerah, instansi dan perusahaan lain, misalnya perbankan yang ada di daerah, hendaknya juga memiliki *database* tentang PKL, sehingga pihak perbankan akan mudah untuk

menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) atau pinjaman, komersial lainnya kepada para PKL.

Bantuan kredit lunak yang diberikan kepada para PKL dimaksudkan sebagai stimulus atau pendorong dengan harapan agar para PKL penerima bantuan dapat berkembang dengan sukses, cepat naik kelas dikemudian hari, terbebas dari lilitan rentenir, sekaligus mampu membesarkan koperasi penyalur. Disamping itu, program registrasi dan bantuan bagi para PKL menurut rencananya juga akan diiringi dengan program pelatihan terhadap PKL. Hal ini dimaksudkan agar dana perkuatan modal yang diberikan akan lebih berdaya guna dan pada gilirannya akan mampu mempercepat PKL untuk naik kelas. Oleh karena itu, peranan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan mampu untuk melakukan pembinaan yang berkelanjutan, baik melalui pelatihan-pelatihan maupun dalam hal pembinaan lokasi tempat PKL menjalankan usahanya. Program pembinaan berkelanjutan dalam maksudnya adalah bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota hendaknya menyiapkan program pembinaan dalam jangka waktu tertentu agar tidak terputus di tengah jalan, mengingat akan adanya pergantian Bupati/Walikota beberapa tahun ke depannya. Kota Sawahlunto untuk tahun 2008 telah mendaftarkan sebanyak 200 orang pedagang kaki lima melalui Koperasi Pedagang Kaki Lima (Kopkal) yang dipimpin oleh Ibu Yusliani.

e. Sejarah Berdirinya Koperasi Pedagang Kaki Lima Sawahlunto (Kopkal)

Koperasi pedagang kaki lima atau yang disingkat dengan Kopkal berdiri pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008. Koperasi ini lahir atau berdiri seiring dengan adanya program pemerintah yaitu dari Dinas Koperasi Perindustrian dan

Perdagangan Sumatera Barat untuk meregistrasi pedagang kaki lima yang ada di wilayah Sumatera Barat tahun 2008. Program registrasi ini dimaksudkan untuk mendata PKL sehingga memiliki data base PKL dan mereka dapat dikelola dan diberdayakan.

Kopkall terbentuk dengan adanya inisiatif dari pemerintah kota melalui Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan dan Koperasi, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar. Awal mulanya Dinas Pasar dan DisperindagKop melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar dengan mengumpulkan pedagang di gelanggang pasar remaja. Di gelanggang inilah kemudian disosialisasikan tentang program registrasi PKL oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Propinsi Sumatera Barat. Dimana program ini sekaligus bertujuan untuk menyatukan, mewadahi dan mengayomi PKL dalam sebuah wadah organisasi yang bernama koperasi. Dengan adanya persetujuan dan keinginan dari para PKL, akhirnya dibentuk kepengurusan dan terpilihlah lima orang untuk menjadi pengurus koperasi yaitu, Ibu Yusliani sebagai ketua, Nora Peri sebagai bendahara, Sutiman sebagai sekretaris, Sarjono sebagai pengawas, dan Wongpat sebagai pengawas.

Akhirnya koperasi pedagang kaki lima ini resmi berbadan hukum tepatnya pada tanggal 17 Maret 2008 dengan adanya Akta Pendirian Koperasi Pedagang Kaki Lima Pasar Sawahlunto dengan Notaris Zufahmy. Menteri Hukum Dan Hak Azasi Amnesia Republik Indonesia Nomor : C-376.HT.03.01-Th.2005 Tanggal 5 Desember 2005.

2. Motivasi

Secara etimologis motivasi berasal dari bahasa latin "*movere*" yang berarti dorongan atau penggerak. Motif dapat diartikan *driving force* yang menggerakkan manusia untuk bertindak laku dan berbuat dengan tujuan tertentu. Moekijat memaknai motif sebagai suatu pengertian yang mengandung semua alat penggerak, alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Istilah motivasi merupakan sumber yang memberikan dorongan dan dorongan itu dapat berasal dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Untuk mempelajari konsepsi motivasi sebagai studi ilmiah mengharuskan terbangunnya pemahaman yang baik tentang apa itu motivasi. Dalam ensiklopedia ilmu-ilmu sosial secara sederhana, motivasi dipahami sebagai suatu yang menggerakkan orang, jika psikologi berusaha menjawab pertanyaan "bagaimana", motivasi lebih berurusan dengan pertanyaan "mengapa", biasanya pertanyaan mendasarnya adalah mengapa organisme berperilaku? (Kuper & Kuper. 2000 : 686).

Sedangkan motivasi oleh para ahli lainnya dimaknai dengan penekanan yang beragam, diantaranya :

- 1) Hasibuan : motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya dan upayanya untuk mencapai kepuasan.
- 2) Cascio : motivasi adalah kekuatan yang dihasilkan dari keinginan seseorang untuk memuaskan kebutuhannya (misalnya rasa lapar, haus dan bermasyarakat)

- 3) American and ensiklopedia : menyatakan bahwa motivasi adalah kecenderungan dalam diri seseorang yang membangkit topangan dan mengarahkan tindak tanduknya. Motivasi merupakan faktor kebutuhan biologis dan emosional yang hanya dapat diduga dari pengamatan tingkah laku manusia (Hasibuan, 2004 : 216-219)
- 4) Gray (1984) sebagaimana yang dikutip oleh Winardi (2001 : 2) menyatakan ”motivasi merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap entualisme dan persistensi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.
- 5) Robbine (dalam Mukhlas, 2005 : 182) memberikan penekanan yang berbeda dalam mengkonstruksikan pemahaman tentang motivasi dalam konteks perilaku organisasi ini ”sebagai kemauan untuk berjuang / berusaha ke tingkat yang lebih tinggi menuju tercapainya tujuan organisasi dengan syarat tidak mengabaikan kemampuannya untuk memperoleh kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pribadi”.

Motivasi sangat penting terus menerus di eksplorasi, ini seperti yang dikemukakan oleh Siagian (2004 : 1) bahwa

”manusia menempati posisi yang paling sentral di dalam kehidupan organisasional dalam arti bahwa keberhasilan dan kegagalan organisasi mencapai tujuannya pada akhirnya ditentukan oleh unsur manusia di dalamnya”.

Motivasi merupakan akibat dari interaksi seseorang dengan situasi tertentu yang dihadapinya, sehingga terdapat perbedaan dalam kekuatan motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menghadapi situasi tertentu dibandingkan dengan orang lain yang menghadapi situasi yang sama (Siagian, 1997 : 137).

Para ahli manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi memberikan definisi atau konsep mengenai motivasi dengan ungkapan berbeda-beda, namun makna yang terkandung sama, yaitu bahwa motivasi adalah keinginan, harapan, kebutuhan, tujuan, sasaran, dorongan, dan insentif

Berdasarkan uraian beberapa definisi yang dikemukakan secara fundamental dapat dipahami bahwa motivasi merupakan suatu dorongan yang memicu seseorang untuk bersikap dan berperilaku. Dari definisi di atas dapat dihipunkan unsur-unsur penting dalam motivasi yakni :

- 1) Adanya suatu dorongan dan faktor pemicu (rangsangan) internal maupun eksternal.
- 2) Adanya suatu kegairahan bekerja
- 3) Tindakan-tindakan terarah
- 4) Adanya tujuan yang ingin dicapai
- 5) Adanya alasan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pribadi

Berdasarkan konsep-konsep di atas, secara lebih luas motivasi dapat dimaknai sebagai suatu dorongan atau keinginan yang dipicu oleh faktor yang berasal dari dalam diri maupun dari luar, yang menimbulkan suatu semangat dan kegairahan dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dengan tindakan-tindakan yang terarah, sehingga tercapai tujuan-tujuan organisasi secara baik dengan tidak mengabaikan tujuan dan kepuasan individu yang menjadi espektasi (harapan). Artinya seorang pedagang akan terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan dan aktivitas pekerjaannya karena adanya suatu tujuan atau kebutuhan yang ingin dipenuhi.

a. Teori-teori Motivasi

Studi tentang motivasi dapat dianalogikan seumpama sumber mata air yang tidak pernah bisa kering, sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, bahwa motivasi merupakan cabang studi manajemen yang senantiasa bisa dieksplorasi karena objek amatannya adalah manusia dalam hal sikap dan perilakunya yang fluktuatif dan berbeda satu sama lain. Eksplorasi oleh para ahli terhadap objek studi ini melahirkan teori-teori motivasi baik yang dikategori klasik maupun kontemporer, diantaranya adalah teori klasik yang sangat populer dikemukakan oleh Abraham Maslow dan dikenal sebagai "*Maslow Hirarchi of Need Theory*" atau disebut Teori Hirarki Kebutuhan dan teori motivasi kontemporer dikemukakan oleh Victor Vroom yang dikenal dengan teori Ekspektasi.

1) Teori Hirarki Kebutuhan Maslow (Klasik)

Dalam hipotesis yang diajukan Maslow dinyatakan bahwa dalam diri setiap orang ada hirarki lima kebutuhan yaitu ; kebutuhan pokok fisik (sandang, pangan, papan dan lain-lain), kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Jika kebutuhan-kebutuhan sebelumnya telah terpenuhi maka kebutuhan-kebutuhan yang berikutnya akan menjadi tuntutan yang dominan dan kebutuhan yang telah terpenuhi secara substansial akan menimbulkan motivasi (Mukhlas. 2005 : 183-184)

2) Teori Ekspektasi

Berbeda dengan Maslow, dari sudut pandang dan pendekatan lain, Victor Vroom mengemukakan teori ekspektasi yang mengatakan bahwa

kekuatan dari kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu yang tergantung pada kekuatan pada ekspektasi bahwa tindakan itu akan segera diikuti oleh sebuah hasil dan tergantung pada adanya daya tarik hasil tersebut kepada individu yang bersangkutan, dimana ada tiga variabel yang saling mempengaruhi. Pertama, daya tarik (*attractiveness*) : pentingnya daya tarik penghargaan yang akan diterima oleh seseorang setelah menyelesaikan pekerjaannya karena merupakan kebutuhan yang belum terpenuhi. Kedua, hubungan prestasi kerja dan penghargaan (*performance-reward*) : derajat kepercayaan karyawan bahwa prestasi kerja pada tingkat tertentu akan menuju pada perolehan penghargaan yang diinginkan. Ketiga, hubungan usaha dan prestasi kerja, kemungkinan yang dipersepsikan karyawan bahwa besarnya usaha yang diperjuangkan akan menuju pada pencapaian prestasi kerja. Jadi keinginan seseorang untuk memproduksi atau melakukan pekerjaannya pada waktu tertentu sangat ditentukan oleh adanya tujuan yang ingin dicapai (Mukhlis, 2005 : 204).

Dari dua versi teori motivasi di atas, secara substantif dapat dikerucutkan menjadi sebuah pemahaman sederhana bahwa munculnya motivasi seseorang karena adanya hasrat atau dorongan dari hal-hal yang dibutuhkan dan ingin dicapai sebagai tujuan dari aktivitas pekerjaannya. Baik itu kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut *physical need* maupun kebutuhan-kebutuhan tingkat lanjutan seperti kebutuhan sosial, prestasi maupun aktualisasi diri.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi

Dalam kaitannya dengan PKL, setidaknya ada tiga hal yang menjadi faktor pendorong kenapa orang termotivasi menjadi pedagang Kaki Lima (PKL). *Pertama*, mencari terobosan dalam menghadapi jalan buntu untuk mencari kesempatan kerja. *Kedua*, sektor pedagang kaki lima memang memberikan daya tarik tersendiri, *Ketiga*, merupakan gabungan dari kedua pertimbangan di atas. Pengalaman di Afrika, misalnya memberi petunjuk akan hal ini. di Afrika pengusaha sektor-sektor informal banyak diminati oleh para pendatang baru di kota, karena sektor informal memberikan kesempatan yang berarti kepada kaum migran untuk berwiraswasta (Sethuraman, 1981). Kecenderungan tersebut juga tampak pada PKL di Indonesia. Hasil penelitian Ali Djoefri Chozin Soen'an (1992) di Yogyakarta mencatat bahwa motivasi seseorang untuk menjadi PKL adalah karena kesulitan mendapat lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan / skill yang dimiliki (77,9%) dan karena memberikan pendapatan yang relatif cukup bagi kehidupan keluarga (74,29%).

Disamping itu, hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di Manahan Surakarta mengungkapkan bahwa ada pengaruh antara modal usaha, jam kerja, lama usaha dan sikap usaha atau kewirausahaan terhadap pendapatan PKL dan faktor modal usaha merupakan faktor yang dominan mempengaruhi pendapatan. Sementara hasil penelitian tentang pengaruh modal usaha dan perilaku kewirausahaan terhadap laba usaha pedagang kaki lima makanan dan minuman di pasar Gemolong Kabupaten Sragen juga mengungkapkan bahwa modal

usaha dan perilaku kewirausahaan berpengaruh positif terhadap laba usaha pedagang kecil makanan dan minuman di pasar Gemolong Sragen. Secara keseluruhan variabel modal usaha dan perilaku kewirausahaan memberikan sumbangan sebesar 42,4% terhadap laba usaha (Wardoyo, 2008).

c. Faktor penghambat motivasi

Sebagaimana pentingnya mengetahui dan memahami hukum-hukum motivasi, mengetahui dan mampu mengenali faktor-faktor penghambat motivasi juga merupakan aspek penting. Merujuk kembali pada makna dasar motivasi, Richard (1997 : 23) menyatakan bahwa :

”dasar bagi semua motivasi adalah harapan, karena tanpa harapan tidak seorangpun akan termotivasi”.

Artinya, harapan dengan berbagai bentuknya akan menjadi pemicu yang mempengaruhi motivasi seseorang. Namun adakalanya motivasi seseorang itu mengalami hambatan oleh faktor-faktor tertentu, baik itu yang disebabkan orang lain, dari dalam diri sendiri, maupun oleh keadaan. Berbagai faktor tersebut penting untuk dikenali agar dapat diupayakan cara-cara yang tepat untuk mengembalikan motivasi pada tingkat yang produktif.

Dalam konteks yang mendasar dan umum, Richard (1997 : 25-32) mengemukakan beberapa penyebab utama penghambat motivasi. Rangkuman dari pemikiran tersebut sebagai berikut :

- 1) Kurang percaya diri. Sikap ini sering diekspresikan melalui perasaan ”mampukah saya melakukannya?”, ”saya tidak cukup mampu?”, ”saya tidak memenuhi syarat” dan seterusnya.

- 2) Kecemasan. Perasaan ini menghinggapi seseorang manakala ia cemas akan sesuatu yang akan menimpanya bila gagal, rasa takut kehilangan pekerjaan jika melakukan kesalahan, dan rasa takut jika dipermalukan di depan rekan sejawat. Perasaan-perasaan tersebut cenderung menyebabkan pegawai memilih untuk tetap aman dan selamat tanpa tindakan.
- 3) Opini negatif merupakan penghambat motivasi yang paling jahat. Lebih banyak kesuksesan dan kemungkinan besar mencapai sukses yang dibinasakan oleh opini negatif. Seperti, ketika anda mengemukakan sebuah gagasan besar untuk didiskusikan dengan teman anda, namun ditanggapi secara negatif.
- 4) Perasaan tidak ada masa depan (pada tempat bekerja) atau sikap pesimis. Hal ini sangat dapat melemahkan motivasi. Seperti ketika peluang karir dan promosi hanya tersedia untuk keluarga pemilik usaha atau orang-orang tertentu tanpa sebuah standar yang profesional dan adil.
- 5) Merasa tidak berguna. Perasaan ini dapat timbul dari rasa tidak tahu apa yang terjadi, tidak seorangpun peduli untuk menceritakan segala sesuatu, bahkan menjadi orang yang terakhir mengetahui. Komunikasi yang tidak sehat ini cenderung melemahkan motivasi pekerja.

3. Konsep Kepuasan

Kepuasan berasal dari kata dasar puas yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1991) berarti merasa senang (lega, kenyang, dan sebagainya) karena sudah merasa secukup-cukupnya atau sudah terpenuhi hasrat hatinya. Sedangkan kepuasan adalah perihal atau perasaan puas,

kesenangan, kelegaan dan sebagainya. Menurut Day (dalam Tse dan Wilton, 1988) dalam Tjiptono (2000 : 146) menyatakan bahwa :

Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi kesesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya.

Menurut Oliver dalam Supranto, (2001 : 233) mendefinisikan, kepuasan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya. Menurut Hunt (1991) dalam Tjiptono (2000 : 90) menyatakan bahwa kepuasan merupakan fungsi dari keyakinan atau operasi konsumen bahwa ia telah diperlakukan secara adil. Menurut Engel dkk, (1990) menyatakan kepuasan pelanggan merupakan evaluasi terwakil dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil (*outcome*) sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan. Implementasi kepuasan tersebut pada : (1) Kepuasan kerja seseorang tercermin dalam perasaannya terhadap pekerjaan itu sendiri dan segala sesuatu yang dihadapinya dalam lingkungan kerja (2) Kepuasan menerima pelayanan ditentukan oleh tingkat kesesuaian jasa yang dirasakan dengan standar yang ditentukan (disepakati).

Dengan demikian kepuasan terdiri dari dua bentuk penilaian kepuasan. *Pertama*, kepuasan diukur dari dua sisi (sudut) yaitu sudut harapan terhadap produk pelayanan itu (idealnya produk itu bagaimana yang diharapkan masyarakat) dan sudut ke dua diukur dari pada pengalaman masyarakat menggunakannya secara nyata. Kemudian pengukuran itu dibandingkan. Menurut Aritonang (2005) dalam Dasman (2008 : 31), jika harapan masyarakat lebih tinggi

berbanding kenyataan yang dialaminya maka warga merasa tidak puas. *Kedua*, kepuasan diukur hanya satu ukuran yang berupa kepuasan masyarakat selepas menggunakan sebuah produk, skor kenyataan produk dijadikan sebagai skor kepuasan masyarakat.

Lukman dalam Harbani (2007 : 144) mengatakan bahwa kepuasan berarti tingkat persamaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapannya. Sejalan pandangan, Gibson dalam Harbani (2007 : 144) menjelaskan bahwa kepuasan pada hakikatnya berkaitan dengan faktor kebutuhan seseorang (pelanggan) artinya jika kebutuhan seseorang terpenuhi maka orang tersebut merasa puas, demikian pula sebaliknya. Sedangkan menurut Handoko (1996 : 93) mengemukakan kepuasan kerja itu merupakan keadaan emosional yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, dengan mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Kemudian Milton (1981 : 151) menjelaskan bahwa secara umum kepuasan kerja berhubungan dengan pendapat atau persepsi seseorang mengenai pekerjaan kelompoknya, dan secara khusus berhubungan dengan perasaan positif dari seseorang terhadap pengalaman-pengalamannya dalam bekerja.

Dari konsep kepuasan kerja di atas, jelas bahwa kepuasan merupakan sesuatu yang dirasakan oleh seseorang dari aktivitasnya atau interaksinya dengan lingkungan kerjanya, atau dengan kata lain sikap dan respon positif tentang pengalamannya yang diperoleh dalam bekerja. Baik sebagai hasil interaksi dengan pekerjaannya, teman sekerjanya, maupun dengan atasan bahkan dengan lingkungan lainnya yang punya keterkaitan dengan bidang kerjanya. Hal ini

biasanya dimanifestasikan dalam bentuk kesukaan, kegembiraan dan kesenangannya dalam melaksanakan pekerjaannya. Kepuasan kerja bersifat pribadi sekali, hal ini dikarenakan setiap pribadi memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai karakteristik keutuhan dan nilai yang berlaku pada masing-masing pribadinya.

Untuk melihat aspek-aspek kepuasan kerja, maka perlu dikemukakan tentang kebutuhan-kebutuhan seseorang, karena kepuasan erat hubungannya dengan masalah kebutuhan. Maslow seperti dikutip Siagian (1993 : 131) mengemukakan bahwa :

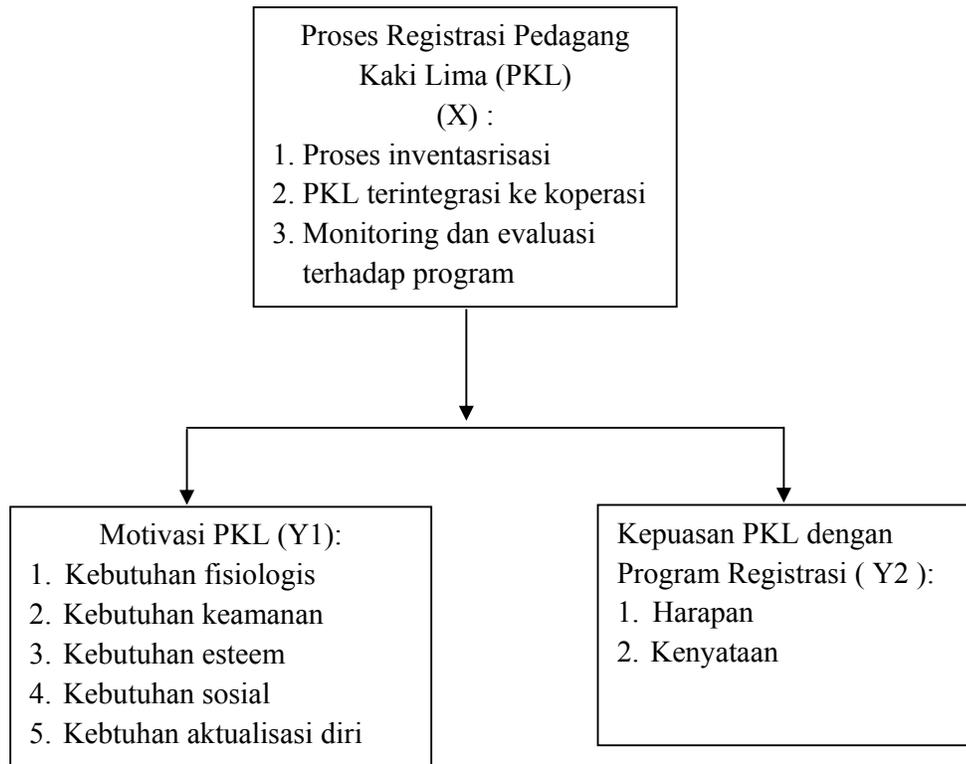
Kebutuhan-kebutuhan manusia digolongkan kepada lima tingkat kebutuhan. Kelima tingkat ini perlu diketahui pimpinan organisasi dan berusaha untuk memuaskannya bagi para bawahan. Kelima tingkat kebutuhan itu adalah : 1) kebutuhan yang bersifat fisiologis, 2) kebutuhan akan keamanan, 3) kebutuhan sosial, 4) kebutuhan akan prestise dan, 5) kebutuhan untuk mempertinggi kapasitas kerja.

Pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut di atas menurut Maslow akan mempengaruhi setiap tingkah laku seseorang. Bila satu kebutuhan telah terpenuhi, maka tingkah laku individu akan dipengaruhi oleh tuntutan pemenuhan kebutuhan berikutnya. Bagi pegawai/pekerja maka sebagian kebutuhannya akan dipenuhi melalui kegiatannya dalam melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan batasan-batasan tersebut, jelas bahwa puas atau tidaknya seseorang dapat dilihat melalui sikap dan perasaannya dalam bekerja, atau responnya terhadap pekerjaan. Respon seseorang akan positif apabila faktor kebutuhannya akan terpenuhi dan memberikan kepuasan pada dirinya. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya imbalan baik materi maupun non materi yang diterima.

B. Kerangka Konseptual

Bagan 2.1 Kerangka Konseptual



butir pernyataan mungkin ada yang belum sesuai dengan indikator walaupun instrumen yang digunakan telah teruji validitas dan reliabilitasnya.

Peneliti tidak mampu mengontrol secara ketat seluruh pernyataan responden yang mengisi angket penelitian untuk pengumpulan data penelitian terhadap tingkat kejujuran mereka. Pengisian angket walaupun sudah diupayakan secara teliti dan hati-hati, tentunya tidak terlepas dari adanya responden yang mengisi angket dengan tidak serius dan asal-asalan. Selain itu juga keterbatasan yang peneliti temukan dalam penelitian ini yaitu dari segi variabel motivasi kerja. Dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Maslow untuk dijadikan sebagai indikator motivasi kerja, dan mungkin bisa juga diuji dengan menggunakan teori lain selain dari teori Maslow yang peneliti pakai untuk menjadi indikator motivasi kerja ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses registrasi pedagang kaki lima Kota Sawahlunto pada umumnya sudah berjalan dengan cukup baik, kecuali indikator PKL terintegrasi ke koperasi yang berada pada kategori baik yaitu 83,09%.
2. Tingkat motivasi pedagang kaki lima Kota Sawahlunto pada umumnya sudah cukup baik, kecuali 2 indikator yang berada pada kategori kurang baik yaitu kebutuhan keamanan 51,9% dan kebutuhan esteem 59,9%.
3. Tingkat kepuasan pedagang kaki lima Kota Sawahlunto dengan program registrasi berada pada kategori sangat tidak puas yaitu 81,6%.
4. Program registrasi pedagang kaki lima memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pedagang kaki lima Kota Sawahlunto pada taraf 11%, atau dapat dipercaya sebesar 89%.
5. Program registrasi pedagang kaki lima memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pedagang kaki lima Kota Sawahlunto pada taraf 7%, atau dapat dipercaya sebesar 93%.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh sehubungan dengan pengaruh program registrasi pedagang

kaki lima terhadap motivasi kerja dan tingkat kepuasan pedagang kaki lima Kota Sawahlunto, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi aparaturn pemerintah yang terkait agar lebih meningkatkan keberpihakannya kepada pedagang kaki lima.
2. Bagi pengurus koperasi sebagai pelaksana program registrasi agar memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pedagang.
3. Bagi para pedagang agar lebih pro aktif lagi dan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya program registrasi yang telah digulirkan dalam rangka memberdayakan pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anaroga Panji. 1992. *Psikologi Kepemimpinan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- _____. 1998. *Psikologi Kerja*. Jakarta : Rinea Cipta.
- Abu Ahmadi dan Cholid Narbuka. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Bahri. 2001. *Kajian Perilaku Pedagang Kaki Lima Dalam Memilih Lokasi Berdagang Di Kawasan Dalam Kota, Pasar Raya dan Taman Imam Bonjol, Universitas Bung Hatta*, Skripsi.
- Darmawan. 1984. *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta : Dekdikbud.
- Denny, Richard. 1997. *Sukses Memotivasi: Jurus Jitu Meningkatkan Prestasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Forum Koperasi, Edisi Juli 2009 ; 5. Mendag Me-launching Registrasi 4.000 PKI di Sumbar ; Registrasi PKL Ala Sumbar Layak Jadi Percontohan Secara Nasional.
- Handoko, T. Hani. 1996. *Manajemen* (edisi 2). Yogyakarta : BPFPE.
- Harbani Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Hidayat. 1978. *Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Husein Umar. 2008. *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama